

**Pengaruh *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Mengwi**

**Ni Kadek Dwi Yuliantari** <sup>(1)</sup>

**Ni Komang Sumadi** <sup>(2)</sup>

**I Wayan Budi Satriya** <sup>(3)</sup>

<sup>(1)(2)(3)</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia  
Jalan Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur  
e-mail: dwiyuliantari7@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study was carried out in order to obtain results from the impact of the whistleblowing system, internal control system, and competence of village officials to prevent fraudulent activity in the use of village funds in Mengwi District. The study population is 328 people who work as village officials, in 15 villages in the Mengwi District. This study used 120 people as a sample with the principle of non-probability sampling implemented by purposive sampling. The next test is applied, namely data validity test, classical assumption test and multiple regression analysis test. This study found that the Whistleblowing System, Internal Control System and Competence of Village Apparatuses have positive effects on Fraud Prevention in Village Fund Management.*

**Keywords:** *whistleblowing system, internal control system, competence of village officials, fraud*

**PENDAHULUAN**

Desa ialah jembatan pemerintah dalam melakukan pembangunan, hal ini karena pembangunan yang ada di tingkat desa akan langsung berdampak pada masyarakat. Jadi dana itu menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan warga desa. Diperolehnya dana des aitu menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah desa untuk bisa mengelolanya dengan baik dan benar untuk peningkatan kesejahteraan serta pembangunan desa.

Dikelolanya dana desa oleh pemerintah desa harus secara efektif dengan visi yang sudah ditetapkan lewat musyawarah bisa diraih secara maksimal. Diberikannya bantuan dana des aitu menjadi sebuah kewajiban pada pemerintah desa sebagai penanggungjawab pada tingkat desa untuk mampu mengelola serta mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya peningkatan pada kesejahteraan masyarakat desa serta memberikan arti pada pembangunan desa.

*Fraud* ialah sebuah perilaku yang melanggar norma-norma bermasyarakat serta tindakan yang hanya menguntungkan pelaku dan merugikan banyak orang (IAPI, 2013). Jadi diperlukan tindakan pencegahan dalam mengelola dana desa supaya kecurangan tersebut bisa diminimalisir. Tindakan pencegahan kecurangan dijalankan untuk menghindari penipuan, manipulasi, plagiarisme, pencurian oleh oknum tertentu untuk mengeruk kepentingan pribadi. Untuk

menanggulangi hal tersebut diperlukan cara yang tepat. Pencegahan tindakan kecurangan untuk pengelolaan sebuah dana desa dapat dilakukan melalui penerapan *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal, dan peningkatan kompetensi aparatur desa.

Kasus penyalahgunaan anggaran dana desa sampai sekarnag masih ada di desa itu, contohnya persoalan korupsi yang ada di Kecamatan Mengwi. Kasus tersebut mengenai dugaan korupsi dari Kepala Desa Baha, Kecamatan Mengwi, yang memberikan kerugian pada negara yakni Rp 1,006,633,856.95. Kepala Desa Baha dicurigai menjalankan praktik korupsi APBDes TA 2016/2017. Dalam anggaran tahun 2016, Desa Baha memperoleh anggaran yakni Rp 7,8 miliar yang diperoleh dari pendapatannya, baik dari pajak, pemerintah pusat, bantuan dan pendapatan asli daerah itu sendiri. Namun pada pelaksanaanya ada program yang tidak dijalankan serta masih ada anggaran yang diam sebanyak Rp 835,2 jt di rekening terdakwa. Sesudah adanya inpeksi dari Inspektorat Pemerintah Kab. Badung ditemukan selisih setelah dibandingkan saldo pada pencatatan desa dengan saldo yang terdapat pada rekening desa. Dimana pada pencatatan buku kas desa tercantum dana Rp 835,2 jt, namun aslinya pada bank hanya ada Rp 26,7 jt, jadi didapat selisih sebanyak Rp 776.453.611 (Miasa, 2019).

Kasus korupsi APBDes juga ada di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi. Mantan perbekel Mengwitani menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan kegiatan korupsi APBDes membuat Negara rugi sebesar Rp 1.227.031.888,06. Pemerolehan dana APBDesa Mengwitani pada 2014 masuk sebanyak Rp 6,5 miliar. Jadi dari dana tersebut terakumulasi pengeluaran sebanyak Rp 5,3 miliar dimana seharusnya tersisa Rp 1,2 Miliar. Tapi setelah diselidikit oleh Tim Inspektorat Kabupaten Badung mendapati sisa anggaran hanya ada sebanyak Rp 3,2 juta lebih. Selisih yang diperoleh sangatlah besar hal ini menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab tidak dapat mempertanggungjawabannya (Miasa, 2018).

**KAJIAN PUSTAKA**

*Fraud* atau kecurangan ialah sebuah kegiatan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat. Mengacu pada konsep dari Cressey dalam Clinton (2015), penyebab adanya tindakan kecurangan berasal dari *Fraud Triangle Theory* dimana tersusun atas *Pressure, Opportunity, Rationalization* (3). Studi ini lebih mengarah pada pemakaian konsep *Fraud Triangle*, hal ini disebabkan karena pada studi ini variable yang diterapkan ialah proksi dari tiga unsur dari teori *Fraud Triangle*.

Studi ini condong memakai teori *Fraud Triangle* karena pada konsep ini memaparkan pentingnya sustu instansi bisa mengurangi terjadinya kecurangan (*fraud*). Seorang dengan sikap

yang bertanggungjawab yang tinggi atas tugas yang diemban, akan condong tidak akan melakukan tindakan-tindakan kecurangan.

Satu dari sekian usaha *whistleblowing system* yakni memberikan laporan atas apa yang telah dijalankan oleh anggota dari organisasi baik itu yang aktif maupun tidak, dimana itu tindakan yang melanggar maupun tidak melanggar baik yang ada di lingkungan kerja organisasi maupun luar. Sistem ini ialah sebuah wadah yang menjadi sarana dari *whistleblower* untuk melaporkan kegiatan kecurangan (Dewi et al., 2022). *Whistleblowing system* ialah alat yang tepat dan baik dalam mendeteksi serta mencegah adanya kecurangan.

H1: *Whistleblowing System* Berdampak Positif Kepada Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan KEMESDA Nomor 19 Tahun 2015 memberikan definisi Sistem Pengendalian Internal (SPI) ialah kegiatan yang dijalankan secara berkelanjutan oleh atasan dan pegawai guna menciptakan keyakinan ketercapaian visi organisasi yang dibentuk dengan kegiatan sebaik mungkin, laporan keuangan yang andal, asset negara yang diamankan, mematuhi peraturan yang berlaku.

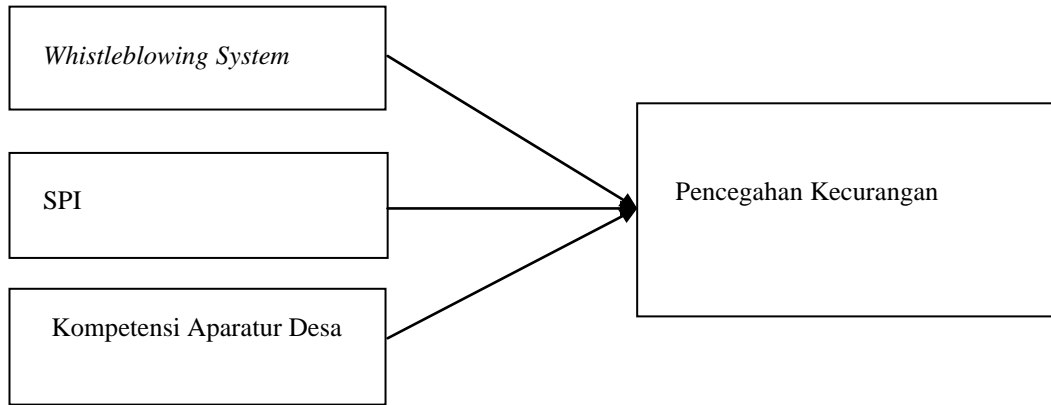
H2: Sistem Pengendalian Internal Berkontribusi Secara Positif Kepada Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi aparatur ialah kemampuan yang ada pada diri aparatur tersebut baik itu pengetahuan, sikap, dan lainnya yang harus ada dalam diri mereka demi bisa menjalankan seluruh tugas yang diberikan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab penuh (Chalida et al., 2022).

H3: Kompetensi Aparatur Berkontribusi Secara Positif Kepada Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa.

## **DESAIN PENELITIAN**

Pada studi ini kerangka pemikiran peneliti ini adalah *whistleblowing system*, SPI, serta kompetensi aparatur desa kepada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Mengwi. Desain studi dapat digambarkan yakni :



Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 328 orang dengan posisi menjadi perangkat desa pada 15 desa yang tercatat di Kecamatan Mengwi. Studi ini mengambil sampel sebesar 120 orang yang diambil dari metode *non-propability sampling* yakni melewati cara *purposive sampling*, dimana sampel dipilah dengan kriteria yang sudah ditentukan.

**HASIL PENELITIAN**

Data studi diambil dengan bantuan kuesioner yang diberikan pada 15 Desa di Kecamatan Mengwi. Kuesioner disebarakan sebanyak 120 dan semua kuesioner kembali seluruhnya.

**Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Wistleblowing	120	22.00	35.00	27.6167	3.25185
SPI	120	39.00	55.00	46.9083	3.83043
Kompetensi	120	44.00	65.00	57.6417	5.47077
Pencegahan <i>Fraud</i>	120	20.00	30.00	25.6583	2.85944
Valid N (listwise)	120				

Hasil untuk statistic deskriptif ialah sebagai berikut:

Melalui hasil diatas terlihat bahwa variabel Pencegahan Fraud (Y) memperlihatkan skor rata-rata > standar deviasi artinya data studi ini berjenis homogen, artinya aparaturn desa di Kecamatan Mengwi memiliki pencegahan fraud yang sama. Skor rata-rata mengarah ke skor artinya bahwa aparaturn desa di Kecamatan Mengwi memiliki pencegahan fraud yang cenderung tinggi.

Melalui hasil diatas terlihat bahwa variabel Whistleblowing System (X1) memperlihatkan skor rata-rata > standar deviasi artinya data studi ini berjenis homogen, artinya aparaturn desa di Kecamatan Mengwi memiliki Whistleblowing System yang kurang lebih sama. Skor rerata

mengarah ke skor minimum penjabarannya ialah aparaturnya di Kecamatan Mengwi memiliki Whistleblowing System yang cenderung tinggi.

Melalui hasil di atas terlihat bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X1) memperlihatkan skor rata-rata > standar deviasi artinya data studi ini berjenis homogen, artinya aparaturnya di Kecamatan Mengwi punya system pengendalian internal yang kurang lebih sama. Skor rata-rata mengarah ke nilai maksimum artinya aparaturnya di Kecamatan Mengwi memiliki sistem pengendalian internal yang cenderung tinggi.

Melalui hasil di atas terlihat bahwa variabel Kompetensi Aparatur (X3) memperlihatkan skor rata-rata > standar deviasi artinya data studi ini berjenis homogen, artinya aparaturnya di Kecamatan Mengwi memiliki Kompetensi Aparatur Desa yang kurang lebih sama. Skor rerata mengarah ke nilai maksimum yang menunjukkan bahwa aparaturnya di Kecamatan Mengwi memiliki Kompetensi Aparatur Desa yang cenderung tinggi.

**Tabel 2 Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik			
Jenis uji	Hasil		Keterangan
Uji normalitas	Asymp. Sig (2-tailed)	0,06	0,060 > 0,05 jadi data penelitian ini berdistribusi normal
Uji multikolinieritas	VIF	1.529	Nilai VIF <10 dan tolerance > 0,1 artinya data studi bebas dari multikolinieritas
		1.479	
		1.914	
	Tolerance	0.654	
		0.676	
Uji heteroskedastisitas	Sig	0.773	Sig > 0,05 artinya penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas
		0.996	
		0.074	

**Tabel 3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Standardized Beta	T-Hitung	Sig.	Keterangan
<i>Constant</i>	-4.773	1.953	.016	
<i>Whistleblowing system</i>	.164	2.568	.011	Signifikan
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	.352	5.612	.000	Signifikan
Kompetensi Aparatur Desa (KAD)	.469	6.567	.000	Signifikan
R2	0.683			
F Statistik	86.565			
P-value	0,000			
Unsur Dependen	Pencegahan Kecurangan			

Dari table ini, dapat dibuatkan fungsi regresi sebagai berikut.

**Pencegahan Fraud = -4,773 + 0,164X1 + 0,352X2 + 0,469X3 + ε**

Bilamana dari hasil yang didapat diatas semua unsur bebas tidak mendapatkan nilai, maka Pencegahan *Fraud* ialah -0.837. Skor beta tiap-tiap variable memiliki arti jika setiap naik 1 poin unsur bebas maka membuat penambahan pada atau juga mengurangi setara dengan skor untuk standardized Beta.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh *Whistleblowing System* pada Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Melalui hasil pengujian jawaban sementara pada Tabel Tabulasi menghasilkan hipotesis 1 diterima. Artinya *Whistleblowing System* punya dampak kepada Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil studi ini mengikuti konsep segitiga kecurangan oleh Cressey dalam Clinton (2015) dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa ada tiga situasi yang mendukung terjadinya sebuah kecurangan. Dimana tiga kondisi tersebut ialah adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran. Instansi yang mempunyai system keamanan dan kesadaran pegawainya tinggi untuk melakukan hal yang positif, cenderung tidak akan ada kejadian tindakan-tindakan kecurangan. Pencegahan *fraud* bisa dijalankan secara maksimal bilamana *whistleblowing system* secara benar diimplementasikan oleh semua pihak. Sistem pelaporan pelanggaran ini menjadi sebuah cara pengawasan walaupun secara tidak langsung. Hal ini membuat pegawai menjadi segan untuk melakukan kecurangan karena semua pegawai dan individu dalam organisasi saling mengawasi satu sama lainnya. Secara empiris hasil studi ini konsisten dengan studi dari (Islamiyah et al., 2020), menunjukkan bahwa *whistleblowing system* tersebut berdampak kepada kecurangan. (Riyanto & Arifin, 2022) dimana dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa *whistleblowing system* berkontribusi secara positif kepada pencegahan *fraud*. Selanjutnya ada studi dari (Mersa et al., 2021) dan (Anandya & Werastuti, 2020) *whistleblowing system* berkontribusi secara positif kepada pencegahan kecurangan.

### **2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal pada Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Melalui hasil pengujian yang ada dalam Tabel Tabulasi memeberikan jawaban jika hipotesis 2 diterima. Hal ini menunjukan SPI berkontribusi positif kepada Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil studi ini sesuai dengan teori *fraud triangle* oleh Cressey dalam Clinton (2015) dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa ada tiga situasi yang mendukung terjadinya sebuah kecurangan. Dimana tiga kondisi tersebut

ialah adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran. Sebuah organisasi dengan system keamanan yang baik dan berjalan dengan ketat, cenderung tidak akan ada kejadian tindakan-tindakan kecurangan. Pencegahan sebuah *fraud* bisa dijalankan dengan baik bilamana sistem pengendalian internal yang diimplementasikan organisasi dengan benar dan tanpa pandang bulu. Salah satu unsur untuk sistem pengendalian internal ialah kegiatan dalam bidang pengawasan yang langsung berhadapan dengan system penilaian yang berkelanjutan (Az-Zahra et al., 2021). Sistem pengendalian internal yang efektif akan membantu melindungi aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran. Sistem pengendalian internal sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi, fraud dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang tersebut dapat diminimalisir dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif. Hasil studi ini memiliki hasil yang konsisten dengan studi dari (Romadaniati et al., 2020) dengan hasil SPI mempunyai dampak kepada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

**3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa pada Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Melalui Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel Tabulasi menyatakan hipotesis 3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa memiliki pengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan fraud triangle oleh Cressey dalam Clinton (2015) dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa ada tiga situasi yang mendukung terjadinya sebuah kecurangan. Dimana tiga kondisi tersebut ialah adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran. Seorang yang mempunyai sikap yang bertanggungjawab yang tinggi atas tugas yang dibebankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang ada di masyarakat, cenderung tidak akan melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Kompetensi Aparatur Desa merupakan kompetensi yang berkaitan dari kemampuan seseorang untuk berfikir baik dan positif dengan berhubungan dari pemecahan masalah. Pada kompetensi aparatur desa harus menggunakan pemahaman akuntansi yang baik sehingga nantinya mampu menyebabkan pengelolaan keuangan yang professional dan baik sehingga dapat menanggulangi potensi

terjadinya kecurangaan (Islamiyah et al., 2020). Sesungguhnya aparaturnya mengemban kewajiban dan tanggung jawab harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dengan terlibatnya masyarakat yang berperan memantau dan menilai diharapkan dapat mengurangi tingkat penyelewengan dana yang dilakukan oleh aparaturnya desa (Aprilia & Yuniasih, 2021). Semakin tinggi kompetensi aparaturnya desa dengan memaksimalkan system pengendalian internal maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan mencegah terjadinya kecurangaan atau fraud. Oleh karena itu Pemerintah setempat berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan pemerintah baik melalui pendidikan maupun pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Hasil studi ini sejalan dengan studi dari (Dewi et al., 2022). Kompetensi Aparatur Desa Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Adapun beberapa kesimpulan yang bisa peneliti berikan setelah melakukan studi ini ialah:

1. *Whistleblowing System* mempunyai pengaruh positif kepada Pencegahan Kecurangaan Dalam Pengelolaan Dana Desa. Artinya semakin baik *whistleblowing system* yang ada dalam pemerintah desa di Kecamatan Mengwi akan lebih baik dalam mencegah sebuah keurangaan pada pengelolaan dana desa.
2. SPI berdampak ke arah positif kepada Pencegahan Kecurangaan Dalam Pengelolaan Dana Desa. Kesimpulannya semakin baik SPI pada pemerintahan desa membuat pencegahan adanya *fraud* pada pengelolaan dana desa semakin tinggi.
3. Kompetensi Aparatur Desa mempunyai dampak kepada Pencegahan Kecurangaan Pada Pengelolaan Dana Desa. Artinya semakin baik kompetensi aparaturnya desa dan sadar akan tanggungjawabnya maka akan memberikan kontribusi yang positif pada pencegahan kecurangaan pada tatakelola dana desa di Kecamatan Mengwi.

**SARAN**

1. Saran peneliti untuk studi ini ialah agar memperhatikan Kompetensi Aparatur, SPI dan *whistleblowing system* karena mempunyai andil yang penting meningkatkan pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Mengwi.
2. Untuk peneliti selanjutnya sebisa mungkin menggunakan unsur lainnya yang menjadi factor dalam mencegah kecurangaan dalam pemakaian dana desa, selanjutnya peneliti juga



bisa mengambil sampel yang lebih luas lagi seperti pengambilan yang berskala Kabupaten untuk bisa mendapatkan hasil studi yang dapat diperbandingkan.

### Daftar Pustaka

- Anandya, C. R., & Werastuti, D. N. S. (2020). Pengaruh Whistleblowing *System*, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 185. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25933>
- Aprilia, K. W. I., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangandes (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Se-Kota Denpasar). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 25–45. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK>
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesityy terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Ayu Az-Zahra, R. S., Jaelani, A., & Nursi, M. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada PT. Bank KEB Hana Indonesia Wilayah Jakarta. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 2(2), 38–44. <https://doi.org/10.34306/abdi.v2i2.555>
- Chalida, N. N., Pramita, Y. D., & Maharani, B. (2022). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa , Sensitivity Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung )*.
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- IAPI. (2013). *Standar Audit (SA 220)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Miasa. (2018). *Korupsi APBDes Mantan Prebeker Mengwitani Dihukum 15 Bulan*. Balipost.Com.

Miasa. (2019). *Sidang Korupsi APBDES, Oknum Perbekel Baha Dipenjara 4,5 Tahun*. Balipost.Com.

Riyanto, R. F., & Arifin, Z. (2022). Efektivitas Whistleblowing System Dan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Sektor Publik Yang Dimoderasi Oleh Pendeteksian *Fraud*. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 105–122. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i2.12922>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. In Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.

Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against *Fraud* Prevention on Village Financial Management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p06>

Widyani, I. G. A. A. T., & Wati, N. W. A. E. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur Desa Dan Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud* Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 160–187.